

## **STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN), KALIMANTAN TIMUR**

Joko Mulyono<sup>1\*</sup>, Rangga Ditya Yofa<sup>1</sup>, Kartika Sari Septanti<sup>1</sup>, Widyadhari Febriani Setyaningrum<sup>1</sup>, Aldho Riski Irawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, 16111, Indonesia

\*Email: [jokomulyono21@gmail.com](mailto:jokomulyono21@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kebijakan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan Kalimantan Timur masih dipasok dari luar daerah akibat produksinya tidak mencukupi. Kajian ini bertujuan untuk menghitung proyeksi kebutuhan pangan pokok dan merumuskan strategi untuk memenuhinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kebutuhan pangan dihitung dari total konsumsi pangan rumah tangga dan non rumah tangga. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dan disintesis untuk merumuskan strategi pemenuhan kebutuhan pangan di IKN. Hasil analisis menunjukkan proyeksi kebutuhan pangan pokok di IKN tahun 2024-2045 semakin meningkat, baik konsumsi rumah tangga maupun non rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan pangan IKN melalui pola perdagangan komoditas pangan menjadi strategi jangka pendek. Strategi jangka menengahnya melalui mekanisme cadangan pangan di IKN. Peningkatan produksi komoditas pangan domestik menjadi strategi jangka panjang. Pemerintah harus segera menyiapkan dan merumuskan strategi dan langkah konkret untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

**Kata kunci:** IKN, Kalimantan Timur, pangan, strategi

## ***STRATEGY FOR FULFILLING FOOD NEEDS IN THE NATIONAL CAPITAL (IKN) EAST KALIMANTAN***

### ***ABSTRACT***

*The policy of moving the national capital to East Kalimantan has an impact on increasing the population and food needs. East Kalimantan's food needs are still supplied from outside the region due to insufficient production. This study aims to calculate the projection of staple food needs and formulate strategies to meet them in the Indonesian Capital City (IKN), East Kalimantan. This study uses a qualitative descriptive analysis approach. Food needs are calculated from the total consumption of household and non-household food. The data and information obtained are analyzed and synthesized to formulate strategies to meet food needs in the IKN. The results of the analysis show that the projection of staple food needs in the IKN in 2024-2045 is increasing, both household and non-household consumption. Fulfilling the IKN's food needs through food commodity trading patterns is a short-term strategy. The medium-term strategy is through a food reserve mechanism in the IKN. Increasing domestic food commodity production is a long-term strategy. The government must immediately prepare and formulate concrete strategies and steps to anticipate the spike in food needs to maintain economic, social, and political stability.*

**Keywords:** IKN, East Kalimantan, food, strategy

## PERNYATAAN KUNCI

- Kalimantan Timur bukan merupakan sentra produksi pangan, sehingga sampai saat ini pemenuhan kebutuhan pangan masih dipenuhi dari luar daerah.
- Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (Undang-Undang No. 3 tahun 2022) memiliki konsekuensi terjadinya lonjakan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan.
- Pemerintah harus segera menyiapkan dan merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan tersebut, agar tidak terjadi kelangkaan dan krisis pangan di Ibu Kota Negara.
- Kelangkaan dan krisis pangan di Ibu Kota Negara dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas nasional.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan untuk memenuhi ketersediaan dan kecukupan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui tiga (3) strategi, yaitu:

- Strategi jangka pendek, melalui perdagangan komoditas pangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan: (i) meningkatkan kerja sama perdagangan dengan produsen; (ii) membangun kemitraan dan jaringan kolaboratif dengan berbagai *stakeholder*; (iii) membentuk BUMD pangan untuk mempermudah dan memperlancar perdagangan pangan; dan (iv) membangun infrastruktur transportasi dan distribusi pangan.
- Strategi jangka menengah, melalui mekanisme cadangan pangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan: (i) membangun, merevitalisasi infrastruktur cadangan pangan (gudang, *cold storage*, *cold chain*, dan *controller atmosphere storage*); (ii) meningkatkan kapasitas keterisian gudang; dan (iii) optimalisasi cadangan pangan oleh BULOG dan BUMD.
- Strategi jangka panjang, melalui peningkatan produksi pangan domestik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan: (i) meningkatkan produktivitas dan indeks pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (penerapan teknologi: benih unggul adaptif, pemupukan berimbang, pengendalian organisme pengganggu

tanaman (OPT)); dan (ii) membangun infrastruktur jaringan irigasi dan tata kelola air untuk mendukung mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

## PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara (IKN) meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha, dan wilayah perairan seluas kurang lebih 68.189 ha. Luas wilayah darat IKN terdiri dari kawasan IKN seluas kurang lebih 56.180 ha dan kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 ha. Perencanaan wilayah IKN terbagi atas tiga wilayah perencanaan, yaitu:

- a. Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 ha;
- b. Kawasan IKN (KIKN) dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 ha; dan
- c. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang merupakan bagian dari KIKN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 ha.

Pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan IKN diarahkan untuk menjadi *smart city*, dan akan diarahkan juga menjadi "Kota Hutan Yang Berkelanjutan". Dengan porsi areal hijau yang besar, diharapkan menjadi IKN yang asri dan memiliki produksi pangan yang cukup besar melalui penetapan lahan pangan abadi untuk menjamin peningkatan ketahanan pangan (Perpres Nomor 64, 2022). Strategi yang dilakukan melalui penetapan lahan pertanian tanaman pangan paling sedikit 10%, melakukan intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan eksisting dan ekstensifikasi lahan pertanian, serta mengembangkan kegiatan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Pembangunan IKN dilaksanakan secara bertahap (5 tahapan), yaitu Tahap 1 (2022-2024); Tahap 2 (2025-2029); Tahap 3 (2030-2034); Tahap 4 (2035-2039); dan Tahap 5 (2040-2045). Kebijakan pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendorong terjadinya migrasi penduduk utamanya pegawai

pemerintah pusat dan keluarganya (ASN, TNI, POLRI, BIN, dan sebagainya) maupun pertambahan penduduk sebagai akibat dari perkembangan ekonomi di IKN secara gradual yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan. Proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2045 mencapai kurang lebih 1,7-1,9 juta jiwa (Perpres Nomor 63, 2022) tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan IKN adalah isu yang kompleks dan membawa konsekuensi yang multidimensional, yang berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan yang memerlukan dukungan kebijakan yang jelas, terukur dan berkesinambungan serta dukungan anggaran dan SDM yang berkualitas. Pembangunan IKN menyebabkan terjadinya deforestasi hutan dan kerusakan ekosistem, tetapi juga memiliki dampak positifnya, yaitu dapat meningkatkan nilai tambah pada sektor agregat dan disagregat ekonomi yang akan menciptakan sektor basis dan non basis (Wangke dan Paulus, 2024).

Beberapa permasalahan yang berpotensi muncul antara lain mulai dari anggaran, lahan, lingkungan, pangan, dan sosial budaya. Anggaran pembangunan IKN sebagian besar dari kerja sama dengan swasta, tetapi saat ini masih ditopang dari APBN. Alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara bersumber dari APBN sebesar 20% dan kerja sama dengan KPBU, BUMN dan investor sebesar 80% (Siswantoro 2022). Berbagai investor telah membuat kesepakatan dalam bentuk *Letter of Intent* (LOI) atau surat minat investasi. Sebanyak 220 calon investor dan sebagian investor menindaklanjuti dengan *Non-Disclosure Agreement* sebanyak 34 calon investor (Bisnis 2023).

Permasalahan dari aspek lahan adalah terjadinya praktek jual beli lahan di bawah tangan (Kompas 2023), meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dari tingkat pusat sampai daerah. Kepastian kepemilikan hak atas tanah penting bagi masyarakat hukum adat karena terkait dengan mata pencaharian, pelestarian hayati, dan identitas kelompok serta budaya (Firnaherera dan Lazuardi 2022).

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan pengalihan hak atas tanah (jual beli) yaitu: Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres Nomor 65 2022) tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN, sedangkan di tingkat provinsi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

(Pergub Nomor 6, 2020) tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga. Selanjutnya di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah diterbitkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara (Perbup Nomor 22, 2019) tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat alami, dengan melibatkan penebangan hutan, perubahan pola aliran sungai, dan kerusakan ekosistem, yang berdampak pada flora, fauna, dan ekosistem setempat (Aulia *et al.* 2023). Beberapa lokasi IKN sering terjadi banjir akibat perubahan peruntukan lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit atau penambangan batu bara (Fristikawati *et al.* 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur mendorong terjadinya perpindahan penduduk, yang dapat mempengaruhi kondisi sosial-budaya, keberagaman suku atau etnis dan berpotensi terjadinya konflik dan juga terpinggirnnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pemindahan Ibu Kota Negara akan menyebabkan terjadinya transformasi sosial budaya yang dihadapkan pada tantangan saat ini, seperti kesiapan Pemda, potensi hilangnya hunian penduduk adat dan juga tantangan seperti urbanisasi yang masif, munculnya budaya baru, dan konflik akibat kesenjangan sosial (Sutanto 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara memiliki konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan pangan akibat terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Titik kritisnya adalah pada saat ini pemenuhan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur sebagian besar bersumber dari luar daerah, akibat produksi pangan domestiknya belum mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Keadaan atau risiko yang bisa timbul akibat pemindahan Ibu Kota Negara antara lain berkurangnya stok pangan dan kenaikan harga pangan, yang disebabkan oleh terganggunya produksi dan distribusi pangan dari daerah produsen sehingga mengurangi volume pangan yang diekspor ke Kalimantan Timur. Selain produksi domestik yang belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pangannya, sehingga harus diimpor dari luar daerah, kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga belum optimal. Jaminan ketersediaan pangan

ke depannya menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ketahanan pangan. Indikator ketahanan pangan nasional meliputi ketersediaan, akses pangan (akses ekonomi, fisik dan sosial), penyerapan pangan, dan status gizi (Webb dan Rogers 2003; Ichwandi 2015).

Khusus dari aspek pangan, ketersediaan dan kecukupan pangan di Ibu Kota Negara menjadi barometer ketersediaan dan kecukupan pangan secara nasional. Dengan memastikan pasokan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan di IKN, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi risiko konflik sosial, dan menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera untuk pembangunan nasional secara keseluruhan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional (Fauzin 2021; Atmakusuma *et al.* 2018). Kajian ini bertujuan untuk menghitung proyeksi kebutuhan pangan pokok dan merumuskan strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

## SITUASI TERKINI

Komoditas pangan pokok atau pangan strategis meliputi beras, kedelai, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng (10 komoditas pangan pokok/strategis. Kalimantan Timur pada tahun 2022, produksi berasnya hanya memenuhi 49,06% dari total kebutuhannya, demikian juga untuk bawang merah hanya 0,11%, cabai keriting 72,41%, cabai rawit 84,79%, daging sapi 73,15%, dan telur ayam 20,95% dan hanya

komoditas daging ayam yang produksinya mampu memenuhi semua kebutuhannya, yaitu 107,84% (Tabel 1) (BPS Kalimantan Timur 2023). Selain dari produksi sendiri, pemenuhan kebutuhan pangan Kalimantan Timur dipasok dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jakarta, dan lainnya, yang masuk melalui Pelabuhan di Samarinda dan Balikpapan (Tabel 2).

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) yang dilakukan oleh BPS, realisasi produksi padi tahun 2021 sebanyak 244,68 ribu ton GKG. Produksi ini mengalami penurunan 6,76% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 262,43 ribu ton GKG. Pada tahun 2019 ketersediaan beras di Kalimantan Timur hanya 66,57% dari kebutuhan konsumsi atau defisit 33,43% dan pada tahun 2025 proyeksi ketersediaan beras di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN hanya memenuhi 44,80% dari kebutuhan konsumsi atau defisit 55,20% (Aswan *et al.*, 2021). Produsen padi utama Kalimantan Timur bersumber dari Kabupaten Kutai Kartanegara (46%), Kabupaten Paser (19%) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (18%) (BPS Kalimantan Timur 2023).

Tabel 1. Tingkat Pemenuhan Pangan di Kaltim dari Produksi Sendiri, 2022

No	Komoditas Pangan	Persentase (%)
1	Beras	49,06
2	Bawang Merah	0,11
3	Cabai Keriting	72,41
4	Cabai Rawit	84,79
5	Daging Sapi	73,15
6	Telur Ayam	20,95
7	Daging Ayam	107,84

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2023), diolah

Tabel 2. Volume, Frekuensi, dan Sumber Pangan Kaltim yang masuk melalui Samarinda, 2022

Komoditas	Kota Samarinda		
	Volume (ton)	Frekuensi (kali)	Sumber
Beras	28.108	321	Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jakarta
Kedelai	4.288	60	Jawa Timur dan Jakarta
Cabai	208	216	Sulawesi Selatan
Bawang Merah	408	211	Sulawesi Selatan
Telur Ayam Ras	925	694	Sulawesi Selatan
Daging Ayam Ras	4.172	478	Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan
Daging Sapi	1.123	158	Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur

Sumber: SKP Samarinda (2023), diolah

Tabel 3. Volume, Frekuensi, dan Sumber Pangan Kaltim yang masuk melalui Kota Balikpapan, 2022

Komoditas	Kota Balikpapan		
	Volume (ton)	Frekuensi (kali)	Sumber
Beras	50.827	821	Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
Kedelai	100	89	Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur
Cabai	93	192	Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
Bawang Merah	1.494	345	Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
Telur Ayam Ras	8.848	1.397	Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
Daging Ayam Ras	11.909	1.458	Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur
Daging Sapi	-	-	-

Sumber: BKP Balikpapan (2023), diolah

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Juli 2023 di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen laporan, publikasi dan informasi yang diakses dari internet (*website*) yang relevan dan diperkuat dengan data dan informasi yang diperoleh dari kunjungan lapang atau observasi langsung di lapangan melalui wawancara dengan beberapa *stakeholder* seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, PT. Pelindo, pedagang bahan pangan, petani, dan lainnya.

Proyeksi kebutuhan pangan di IKN diperoleh dari kebutuhan pangan atau konsumsi rumah tangga dan non rumah tangga meliputi hotel, restoran, catering, rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan/lapas, asrama, dan industri pengolahan. Kebutuhan pangan yang dianalisis fokus pada 10 pangan pokok meliputi beras, kedelai, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Proyeksi kebutuhan pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Proyeksi kebutuhan pangan = kebutuhan pangan rumah tangga + kebutuhan pangan non rumah tangga .....(1)

Kebutuhan pangan rumah tangga dihitung dari proyeksi jumlah penduduk dikali tingkat konsumsi per kapitanya. Kebutuhan pangan non rumah tangga dihitung dari konsumsi rumah tangga dikali koefisien konsumsi non rumah tangga. Proyeksi kebutuhan pangan rumah tangga dan non rumah tangga dihitung dengan rumus berikut:

Kebutuhan pangan rumah tangga = proyeksi jumlah penduduk  $\times$  tingkat konsumsi per kapita . .....(2)

Kebutuhan pangan non rumah tangga = kebutuhan pangan/konsumsi rumah tangga  $\times$  koefisien konsumsi non rumah tangga. ....(3)

Proyeksi jumlah penduduk di IKN menggunakan data proyeksi yang tertuang dalam Perpres Nomor 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Proyeksi jumlah penduduk ini menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan IKN mulai tahap 1 sampai tahap 5 (2024-2045), dimana penghitungannya mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya faktor kegiatan ekonomi. Penduduk yang diproyeksikan berpindah ke IKN berdasarkan Perpres tersebut meliputi ASN kementerian/lembaga, TNI, Polri pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, unsur pertahanan dan keamanan lainnya beserta anggota keluarganya, tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya, mahasiswa, akademisi, peneliti, dan sebagainya sesuai dengan tahapan pembangunan IKN.

Tingkat konsumsi per kapita menggunakan data dari BPS berdasarkan wilayah/kabupaten yang masuk dalam deliniasi IKN. Koefisien konsumsi non rumah tangga diperoleh dari data sekunder hasil kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tentang kajian neraca pangan di Provinsi Banten. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya dilakukan analisis dan sintesis untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah antisipatif dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

## ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

### Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Pangan di IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara dimaksudkan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara (IKN) diharapkan menjadi magnet pertumbuhan

ekonomi baru, dan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan IKN dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari sasaran dan proses pembangunan, kesiapan lokasi, dan sumber daya yang diperlukan (UU Nomor 3 Tahun 2022) tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara mendorong terjadinya migrasi penduduk, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk.

Pemerintah telah menghitung proyeksi peningkatan jumlah penduduk berdasarkan analisis kegiatan ekonomi dari setiap tahapan pembangunan IKN, dimana pada tahap 1 dan 2 akan terjadi peningkatan jumlah penduduk secara eksponensial, kemudian pada tahap 3 peningkatan jumlah penduduk akan melambat dan pada tahap 4 dan 5 akan meningkat kembali sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi. Pada tahap 1 dan 2 pembangunan IKN, proyeksi peningkatan jumlah penduduk sangat signifikan karena dimulainya pembangunan IKN dan skema pemindahan ASN.

Jumlah penduduk pada tahun 2024 yang merupakan akhir tahap 1 pembangunan IKN diproyeksikan 488.409 jiwa dan pada tahun 2029 (akhir tahap 2) diproyeksikan 1.283.589 jiwa. Pada tahun 2034 (akhir tahap 3) jumlah penduduknya diproyeksikan 1.452.967 jiwa, pada tahun 2039 (akhir tahap 4) diproyeksikan 1.666.121 jiwa, dan pada tahun 2045 (akhir tahap 5) diproyeksikan 1.911.988 jiwa (Perpres Nomor 63, 2022) tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, akan diikuti peningkatan kebutuhan

pangan. Peningkatan kebutuhan pangan ini dapat menghadirkan masalah tersendiri, sehingga ketahanan pangan menjadi penting untuk diperhatikan. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh 3 sub sistem, yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, dimana ketiganya harus dipenuhi secara utuh dan apabila salah satunya tidak terpenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan (Rusdiana dan Maesya, 2017; Salasa, 2021). Pemerintah harus membangun sistem ketahanan pangan yang baik dan berdaya tahan (*resilience*).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh proyeksi kebutuhan pangan pokok atau strategis untuk 10 (sepuluh) komoditas pangan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2045 (tahap 1-5) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesepuluh komoditas pangan pokok/strategis tersebut, yaitu: beras, kedelai, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng.

Proyeksi kebutuhan beras di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari tahap 1-5 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 (akhir tahap 1) proyeksi kebutuhan beras mencapai 37.502,89 ton terdiri dari kebutuhan beras untuk rumah tangga 36.308,50 ton (96,82%) dan non rumah tangga 1.194,39 ton (3,18%). Pada tahun 2045 (akhir tahap 5) proyeksi kebutuhan beras meningkat menjadi 145.800,50 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 141.832,80 ton (97,28%) dan non rumah tangga 3.967,70 ton (2,72%). Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan beras di IKN tahun 2024-2045 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Beras di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	36.308,50	1.194,39	37.502,89
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	95.249,31	2.737,11	97.986,41
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	110.649,34	3.147,10	110.878,24
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	123607,63	3.488,68	127.096,30
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	141.832,80	3.967,70	145.800,50

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Proyeksi kebutuhan kedelai tahun 2024-2045 (akhir tahap 1-5) mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan jumlah penduduk. Proyeksi kebutuhan kedelai untuk rumah tangga pada tahun 2024 (akhir tahap 1) sebesar 3.151,24 ton, sedangkan proyeksi kebutuhan kedelai untuk rumah tangga tahun 2045 (akhir tahap 5) meningkat menjadi 12.887,00 ton. Proyeksi

jumlah penduduk dan kebutuhan kedelai di IKN tahun 2024-2045 disajikan pada Tabel 5.

Kebutuhan cabai merah tahun 2024 (akhir tahap 1) diproyeksikan 1.012,93 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 946,15 ton (93,41%) dan non rumah tangga 66,78 ton (6,59%). Kebutuhan cabai merah pada tahun 2045 (akhir tahap 5) diproyeksikan meningkat menjadi

4.860,05 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 4.525,52 ton (93,12%) dan non rumah tangga 334,53 ton (6,88%). Proyeksi jumlah

penduduk dan kebutuhan cabai merah di IKN tahun 2024-2045 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Kedelai di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	3.151,24	-	3.151,24
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	8.594,40	-	8.594,40
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	9.749,21	-	9.749,21
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	11.205,57	-	11.205,57
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	12.887,00	-	12.887,00

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Tabel 6. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Cabai Merah di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	946,15	66,78	1.012,93
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	2.952,92	217,00	3.169,92
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	3.373,50	248,38	3.621,88
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	3.907,38	288,29	4.195,67
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	4.525,52	334,53	4.860,05

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Pada tahun 2024 (akhir tahap 1) proyeksi kebutuhan cabai rawit mencapai 1.170,05 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 1.001,53 ton (85,60%) dan non rumah tangga 168,52 ton (14,40%). Pada tahun 2045 (akhir tahap 5) proyeksi kebutuhan cabai rawit mencapai

4.609,17 ton, terdiri dari kebutuhan cabai rawit untuk rumah tangga 3.804,69 ton (82,55%) dan non rumah tangga 804,48 ton (17,45%). Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan cabai rawit di IKN tahun 2024-2045 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Cabai Rawit di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	1.001,53	168,52	1.170,05
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	2.566,27	525,06	3.091,32
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	2.900,54	599,79	3.500,33
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	3.320,55	694,65	4.015,20
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	3.804,69	804,48	4.609,17

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Proyeksi kebutuhan bawang merah mengalami peningkatan (Tabel 8). Pada tahun 2024 (akhir tahap 1) proyeksi kebutuhan bawang merah 14.792,35 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 11.383,69 ton (76,96%) dan non rumah

tangga 3.408,67 ton (23,04%). Proyeksi kebutuhan bawang merah tahun 2045 (akhir tahap 5) menjadi 51.982,37 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 42.489,15 ton (81,74%) dan non rumah tangga 9.493,22 ton (18,26%).

Tabel 8. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Bawang Merah di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	11.383,69	3.408,67	14.792,35
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	28.739,79	6.772,61	35.512,40
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	32.454,11	7.521,38	39.975,49
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	37.116,79	8.442,12	45.558,91
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	42.489,15	9.493,22	51.982,37

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Kebutuhan daging sapi tahun 2024 (akhir tahap 1) berdasarkan Tabel 9 diproyeksikan 3.431,39 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 562,80 ton (16,40%) dan non rumah tangga 2.868,58 ton (83,60%). Proyeksi kebutuhan

daging sapi akhir tahap 5 (tahun 2045) menjadi 17.288,44 ton, terdiri dari kebutuhan daging sapi untuk rumah tangga 2.761,51 ton (15,97%) dan kebutuhan daging sapi untuk non rumah tangga 14.526,93 ton (84,03%).

Tabel 9. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Daging Sapi di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	562,80	2.868,58	3.431,39
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	1.795,99	9.410,44	11.206,43
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	2.053,99	10.776,30	12.830,29
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	2.381,80	12.513,61	14.895,41
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	2.761,51	14.526,93	17.288,44

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Kebutuhan daging ayam pada tahun 2024 (akhir tahap 1) diproyeksikan 6.804,68 ton, terdiri dari kebutuhan daging ayam untuk rumah tangga 4.637,45 ton (68,15%) dan non rumah tangga 2.167,22 ton (31,85%). Pada tahun 2045 (akhir tahap 5) kebutuhan daging ayam diproyeksikan

meningkat menjadi 29.456,61 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 19.442,61 ton (66,00%) dan non rumah tangga 10.014,00 ton (34,00%). Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan daging sapi di IKN tahun 2024-2045 disajikan Tabel 10.

Tabel 10. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Daging Ayam di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	4.637,45	2.167,22	6.804,68
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	12.918,92	6.564,07	19.482,99
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	14.672,13	7.487,82	22.159,95
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	16.885,68	8.658,87	25.544,56
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	19.442,61	10.014,00	29.456,61

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Proyeksi kebutuhan telur ayam di IKN pada tahun 2024-2045 (akhir tahap 1-5) mengalami peningkatan. Proyeksi kebutuhan telur ayam pada tahun 2024 (akhir tahap 1) sebesar 6.922,89 ton, terdiri dari kebutuhan telur ayam untuk rumah tangga 4.418,14 ton (63,82%), untuk non rumah tangga 2.504,75 ton (36,18%). Proyeksi kebutuhan

telur ayam tahun 2045 (akhir tahap 5) meningkat menjadi 29.511,70 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 18.008,25 ton (61,02%) dan non rumah tangga 11.503,44 ton (38,98%). Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan telur ayam di IKN tahun 2024-2045 disajikan Tabel 11.

Tabel 11. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Telur Ayam di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	4.418,14	2.504,75	6.922,89
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	12.015,71	7.546,55	19.562,26
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	13.628,07	8.606,27	22.234,34
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	15.661,14	9.949,38	25.610,52
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	18.008,25	11.503,44	29.511,70

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Proyeksi kebutuhan gula pasir untuk rumah tangga dan non rumah tangga juga semakin tinggi (Tabel 12). Pada tahun 2024 (akhir tahap 1) proyeksi kebutuhan gula pasir sebesar 4.570,74 ton, terdiri dari kebutuhan gula pasir untuk rumah tangga 2.964,68 ton (64,86%) dan kebutuhan gula

pasir untuk non rumah tangga 1.606,06 ton (35,14%). Proyeksi kebutuhan gula pasir tahun 2045 (akhir tahap 5) meningkat menjadi 16.766,02 ton, terdiri dari kebutuhan untuk rumah tangga 9.957,47 ton (59,39%) dan non rumah tangga 6.808,55 ton (40,61%).



Tabel 12. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Gula Pasir di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	2.964,68	1.606,06	4.570,74
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	6.855,82	4.516,76	11.372,58
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	7.698,46	5.132,39	12.830,85
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	8.749,64	5.910,05	14.659,70
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	9.957,47	6.808,55	16.766,02

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Proyeksi kebutuhan minyak goreng tahun 2024 (akhir tahap 1) sebesar 6.861,20 ton, terdiri dari kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga 5.736,92 ton (83,61%) dan untuk non rumah tangga 1.124,28 ton (16,39%). Pada tahun 2045 (akhir tahap 5), proyeksi kebutuhan minyak

goreng meningkat menjadi 28.422,25 ton, terdiri dari kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga sebesar 23.014,38 ton (80,97%) dan untuk non rumah tangga 5.407,87 ton (19,03%). Proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan minyak goreng IKN tahun 2024-2045 disajikan Tabel 13.

Tabel 13. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Minyak Goreng di IKN 2024-2045

Tahun	Tahapan IKN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (ton)		Total Kebutuhan Pangan (ton)
			RT	Non RT	
2024	Akhir Tahap 1	488.409	5.736,92	1.124,28	6.861,20
2029	Akhir Tahap 2	1.283.589	15.392,75	3.526,09	18.918,83
2034	Akhir Tahap 3	1.452.967	17.444,84	4.029,26	21.474,10
2039	Akhir Tahap 4	1.666.121	20.030,42	4.668,11	24.698,53
2045	Akhir Tahap 5	1.911.988	23.014,38	5.407,87	28.422,25

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2022 dan BPS (2023), diolah

Sepuluh komoditas pangan pokok atau strategis tersebut, proyeksi kebutuhan pangan untuk rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pangan non rumah tangga, kecuali daging sapi. Proyeksi kebutuhan daging sapi untuk non rumah tangga lebih tinggi dibandingkan untuk rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi daging sapi di hotel, restoran, catering, rumah sakit, lapas, asrama, dan industri pengolahan (non rumah tangga) lebih tinggi dibandingkan kebutuhan daging sapi di rumah tangga.

### Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok di IKN

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan harus dibangun secara mandiri dan berdaulat dengan sasaran peningkatan kemampuan produksi dan kecukupan penyediaan pangan secara mandiri, beraneka ragam, memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi masyarakat. Kebutuhan pangan pokok atau strategis secara umum dapat dipenuhi dari 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Produksi sendiri, melalui berbagai upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangannya 2. Cadangan pangan, melalui peningkatan cadangan pangan di wilayahnya, dan 3. Perdagangan pangan, dengan mendatangkan

dari luar wilayahnya. Ketersediaan atau pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan melalui produksi domestik, cadangan pangan, dan impor (Suryana 2014; Wijaya *et al.* 2022). Sejalan dengan itu, akselerasi pembangunan pangan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan yang lebih menyebar dan beragam, pengembangan pangan dan budaya pangan lokal, modernisasi sistem produksi pangan, pengelolaan perdagangan pangan, dan penguatan cadangan pangan masyarakat (Rachmat 2015). Cadangan pangan nasional merupakan ketersediaan pangan yang ada di wilayah Indonesia sebagai produk konsumsi manusia serta sebagai antisipasi gangguan pasokan dan harga, kekurangan pangan, dan keadaan darurat (UU Nomor 18 2012).

Strategi dan langkah-langkah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok di IKN:

1. Strategi Jangka Pendek, yaitu melalui perdagangan komoditas pangan dengan produsen dari sentra-sentra pangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perdagangan pangan dengan produsen di daerah sentra pangan guna memenuhi kebutuhan pangan di IKN, melalui:
  - a. Meningkatkan kerja sama perdagangan pangan dengan produsen dari daerah sentra pangan. Kerja sama ini perlu dilakukan

untuk mencukupi seluruh kebutuhan pangan di IKN, juga untuk mencegah terjadinya inflasi pangan. Permintaan yang tinggi di IKN dapat mendorong terjadinya kelangkaan pangan di daerah produsen akibat pelaku bisnis mencari keuntungan, yang menyebabkan harga pangan meroket.

- b. Membangun kemitraan dan jaringan kolaboratif dengan berbagai *stakeholder*. Membangun kemitraan dengan produsen pangan, pemerintah daerah, dan pihak swasta memfasilitasi kolaborasi produksi, pengolahan, dan distribusi pangan.
  - c. Membentuk BUMD pangan untuk mempermudah dan memperlancar perdagangan pangan.
  - d. Membangun infrastruktur transportasi dan distribusi pangan. Infrastruktur transportasi dan distribusi pangan sangat dibutuhkan dan penting untuk mempermudah aliran barang dari daerah sentra produksi pangan ke wilayah IKN, seperti pelabuhan, pasar induk, dan sebagainya.
2. Strategi Jangka Menengah, yaitu melalui mekanisme cadangan pangan di daerahnya. Langkah-langkah yang dilakukan melalui:
- a. Membangun dan atau merevitalisasi infrastruktur cadangan pangan, seperti gudang, *cold storage*, *cold chain*, dan *controller atmosphere storage*.
  - b. Meningkatkan kapasitas keterisian gudang-gudang yang dimiliki oleh BULOG.
  - c. Optimalisasi cadangan pangan di IKN untuk menjamin stabilitas pangannya oleh BULOG dan BUMD.
3. Strategi Jangka Panjang, yaitu melalui produksi pangan dari daerahnya sendiri (domestik). Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan domestik (produksi sendiri) dalam memenuhi kebutuhan pangan di IKN melalui:
- a. Meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dapat dilakukan melalui penerapan teknologi, seperti penggunaan varietas unggul yang adaptif, pemupukan berimbang, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan sebagainya. Intensifikasi pertanian dapat dilakukan di lahan-lahan pertanian eksisting, sedangkan ekstensifikasi

pertanian dapat dilakukan di lahan-lahan bekas tambang.

- b. Membangun infrastruktur jaringan irigasi dan tata kelola air untuk mendukung peningkatan produksi komoditas pangan. Membangun sistem irigasi yang handal dan efisien untuk mengairi lahan pertanian dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sehingga dapat mendorong ketahanan pangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi dan praktik pengelolaan air yang lebih efisien (tata kelola), termasuk teknologi irigasi modern, sistem penyimpanan air, dan pengelolaan air yang terpadu untuk mengurangi pemborosan dan memastikan distribusi yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswan A, Rachmina D, Krisnamurthi YB. 2021. Neraca Ketersediaan Beras di Kalimantan Timur sebagai Calon Ibukota Baru Indonesia dengan Pendekatan Sistem Dinamik. *Analisis Kebijakan Pertanian* 19(2): 207–218. DOI: 10.21082/akp.v19n2.2021.207-218.
- Atmakusuma J, Harmini, Winandi R. 2015. Mungkinkah Swasembada Daging Terwujud?. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 1(2): 105-109.
- Aulia R, Kaswanto RL, Arifin HS, Mosyafitiani A, Syasita N, Wahyu A, Wiyoga H. 2023. Assessing the Benefits and Management of Urban Forest in Supporting Low Carbon City in Jakarta, Indonesia. *Biodiversitas* 24:6151-6159. DOI: 0.13057/biodiv/d241136.
- Bisnis. 2023. Bahlil Sebut Investasi Swasta Bakal Mengalir ke IKN Agustus 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- BPS Kalimantan Timur. 2023. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2023.
- Fauzin F. 2021. Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia yang Berbasis pada Kedaulatan Pangan. *Jurnal Pamator* 14(1): 1–9. DOI: 10.21107/Pamator.V14i1.10497.
- Firnaherera VA, Lazuardi A. 2022. Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1(1): 71–84. DOI: 10.21787/Jskp.1.2022.71-84.
- Fristikawati Y, Alvander R, Wibowo V. 2022.

- Pengaturan dan Penerapan *Sustainable Development* pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *E-Journal Komunitas Yustisia* 5(2): 739–749. DOI: 10.23887/Jatayu.V5i2.51859.
- Ichwandi I. 2015. Membumikan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 1(2): 97–104.
- Kompas. 2023. Jual Beli Lahan Bawah Tangan di Kawasan IKN Masih Marak. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Books/NBK558907/>.
- [Perbup] Peraturan Bupati. 2019. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli Tanah/Peralihan Hak Atas Tanah.
- [Pergub] Peraturan Gubernur. 2020. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan Pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara Dan Kawasan Penyangga.
- [Perpres] Peraturan Presiden. 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- [Perpres] Peraturan Presiden. 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
- [Perpres] Peraturan Presiden. 2022. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
- Rachmat M. 2015. Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian yang Mandiri dan Berdaulat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 33(1): 1–17. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3799>.
- Rusdiana S, Maesya A. 2017. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pangan di Indonesia. *Agriekonomika* 6(1): 12–25. DOI: 10.21107/Agriekonomika.V6i1.1795.
- Salasa AR. 2021. Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik* 13(1): 35–48. DOI: 10.20473/Jap.V13i1.29357.
- Siswanto S. 2022. Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan. *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1(1): 27–41. DOI: 10.21787/Jskp.1.2022.27-41.
- Suryana A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan: Tantangan Dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 32(2): 123–135.
- Sutanto HP. 2022. Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1(1): 43–56. DOI: 10.21787/Jskp.1.2022.43-56.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Wangke F, Paulus JM. 2024. Kota Hutan Ibu Kota Nusantara dalam Model Desain Ramah Lingkungan. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 143–154. DOI: 10.29244/Jkebijakan.V11i2.
- Webb P, Rogers B. 2003. Addressing The “In” In Food Insecurity. Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA). Washington DC.
- Wijaya O, Juniawan W, Widodo. 2022. Alternatif Kebijakan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Pendekatan Cluster Analysis. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 9(3): 133–148. DOI: 10.29244/jkebijakan.v9i3.32799.